

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DALAM
MENANGGULANGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN
SOSIAL (PMKS) PADA GELANDANGAN DAN PENGEMIS
(STUDI KASUS DESA GRINTING)**

M. Zain Yaumil Akbar

Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP UNDIP Semarang

ABSTRACT

This study aims to determine the problem of handling the Brebes Regency Government for homeless and beggars regarding the stigma of Grinting Village as a Beggar Village. This research use descriptive qualitative approach. The research locations in the Social Service of Brebes Regency and Grinting Village in Bulakamba District, Brebes Regency, Central Java Province, with the consideration of many people in this area became beggars by vandalizing in Jakarta and surrounding areas.

The subject of this study was determined purposively based on certain criteria, namely overcoming the stigma of begging villages embedded in Grinting Village. Data collection in this study uses interviews and in-depth document review. The collected data were analyzed using qualitative descriptive analysis techniques.

This study revealed that homeless people and beggars in Grinting Village became a profession for some citizens, because they got money instantly and economic factors or poverty. Countermeasures are carried out by the government through assistance from the government and development and empowerment of village potential. Assistance provided from the Social Service is Rp. 2,000,000 per person. The development of village potential through a creative economy that has economic selling points.

Keywords: The Role of the Government, Persons with Social Welfare Problems, Homelessness and Beggars, Grinting Village.

PENDAHULUAN

Fenomena Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) dalam masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari realitas kehidupan masyarakat, sekaligus salah satu kesenjangan sosial yang muncul dalam masyarakat di Indonesia. Hampir seluruh kota-kota besar yang

ada di Indonesia dijamuri dengan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng).

Menurut Permensos RI No. 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, gelandangan

adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum. Adapun 4 kriteria gelandangan yaitu, (1) tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP), (2) tanpa tempat tinggal yang tetap, dan (4) tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya. Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan memintaminta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain. Adapun 4 kriteria yang dimiliki oleh pengemis yaitu, (1) mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain, (2) berpakaian kumuh dan compang-camping, (3) berada di tempat-tempat ramai/strategis, dan (4) memperalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.

Penjelasan lebih teknis sebagai dasar hukum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis dan Keputusan Presiden No. 40 Tahun 1983 tentang koordinasi penanggulangan gelandangan dan pengemis. Dalam kedua peraturan tersebut intinya yang menjadi sasaran pokok dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis adalah perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi

sumber timbulnya gelandangan dan pengemis, selain keseluruhan gelandangan dan pengemis itu sendiri.

Selanjutnya, munculnya perilaku para Gelandangan dan Pengemis atau yang biasa disebut dengan Gepeng sangat dipengaruhi oleh faktor kemiskinan absolut, yakni dimana keadaan miskin yang diakibatkan oleh ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti untuk makan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain-lain. Selain itu diindikasikan oleh faktor kemiskinan struktural sebagai penyebab kemiskinan yang secara turun-temurun akan diwarisi kepada keturunannya dan hal ini yang menyebabkan rantai kemiskinan yang tidak akan putus.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, jumlah angka kemiskinan Kabupaten Brebes sebanyak 352.010 jiwa pada tahun 2015, 347.980 jiwa pada tahun 2016, 343.460 jiwa pada tahun 2017. Jumlah angka kemiskinan pada Kabupaten Brebes tersebut setiap tahun mengalami penurunan, meskipun tidak signifikan namun patut diapresiasi sebagai salah satu keberhasilan Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan permasalahan kemiskinan. Walaupun demikian, Kabupaten Brebes masih tercatat di data BPS Jawa Tengah pada Maret 2017 sebagai kabupaten

termiskin peringkat ketiga di Jawa Tengah sebesar 19,14%, yang mana angka tersebut di atas angka kemiskinan provinsi. Rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah ini menyebabkan kemampuan daerah untuk menciptakan lapangan pekerjaan menjadi sangat terbatas dan menyebabkan pengangguran menjadi banyak. Disamping itu, mengakibatkan jumlah penduduk miskin di kabupaten Brebes meningkat.

Selain angka kemiskinan, Kabupaten Brebes juga masih mempunyai pekerjaan rumah mengatasi permasalahan PMKS. Jumlah PMKS di Kabupaten Brebes tahun 2014 sebanyak 261.208 jiwa dan tertangani 143.899 jiwa (55,09%). Pada tahun 2015 jumlah PMKS menurun menjadi 118.407 jiwa, mengalami penurunan dibanding tahun 2014 dan yang mendapatkan penanganan sebanyak 99.544 jiwa (84,07%). Dengan demikian masih banyak aspek atau indikator PMKS yang juga harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah guna untuk menyejahterakan masyarakatnya.

Di sisi lain, bukan hanya masalah kemiskinan yang disebabkan oleh ekonomi masyarakat lemah, namun mentalitas miskin juga semakin merebak pada sebagian individu yang masih berada dalam usia produktif. Dengan begitu, pilihan menjadi gelandangan dan

pengemis (Gepeng) merupakan pilihan yang mudah untuk mendapatkan penghasilan dalam waktu singkat, hanya bermodalkan baju kumuh dan wajah memelas tanpa merasa kehilangan harga diri.

Munculnya Gepeng di Kabupaten Brebes memang merupakan fenomena yang sejak lama terjadi. Kemunculannya menjadi fenomena menarik, dimana sekarang ini para Gepeng tidak hanya di rumah-rumah penduduk, namun di perkantoran pun merebak. Mereka para Gepeng ini keluar masuk kantor, dari kantor yang satu ke kantor lain. Ironisnya para Gepeng ini memiliki kondisi tubuh sehat dan normal. Pelaku Gepeng ini mulai dari usia anak-anak sampai orang dewasa. Selama persoalan kemiskinan belum teratasi, jumlah Gepeng dan anak jalanan tidak akan pernah berkurang, justru jumlahnya akan semakin bertambah.

Permasalahan sosial tidak bisa diberantas 100%, terlebih masalah Gepeng yang merupakan salah satu bentuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pada tahun 2016, jumlah Gepeng di Kabupaten Brebes sebanyak 227 jiwa dibandingkan pada tahun 2012 sebanyak 511 jiwa. Meskipun mengalami penurunan hingga separuhnya, populasi tersebut akan terus ada terutama di kota-kota besar. Namun harapan masyarakat, hal tersebut dapat diminimalisir sejalan

dengan kemungkinan terjadinya kriminilitas di suatu daerah. Peran pemerintah memang sangatlah penting dalam menangani kasus sosial GEPENG ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer dilakukan dengan cara wawancara langsung serta observasi dan data sekunder diperoleh dari data-data yang relevan dengan penelitian. Bentuk wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara semi terstruktur dimana wawancara bersifat terbuka dimana subyek tahu bahwa mereka sedang diwawancarai serta mengetahui tujuan dari wawancara yang dilakukan. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *puposive sampling* sebanyak 3 orang, terdiri dari Kepala Seksi Penanganan Tuna Sosial dan Disabilitas, Kepala Desa Grinting, serta Ketua PKK Desa Grinting Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Brebes dan Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Grinting dikarenakan desa ini merupakan lokasi yang mendapat stigma desa penghasil pengemis dan gelandangan.

PEMBAHASAN

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Khususnya Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) di Kabupaten Brebes

Kabupaten Brebes, seperti kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah, memiliki berbagai jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menjadi tanggungjawab pemerintah, dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Brebes. Permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Brebes berakar dari kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah PMKS di Kabupaten Brebes pada tahun 2014 sebanyak 261.208 jiwa dan yang tertangani sebanyak 143.899 jiwa (55,09%). Kemudian pada tahun 2015 jumlah PMKS menurun menjadi 118.407 jiwa. Mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2014 dan yang mendapatkan penanganan sebanyak 99.544 jiwa (84,07%). Meskipun demikian masih banyak aspek atau indikator PMKS yang juga harus diselesaikan oleh Pemerintah setempat.

Sejarah Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Desa Grinting

Apabila mendengar istilah penghasil gelandangan dan pengemis (gepeng) yang berasal dari Kabupaten Brebes, maka orang segera tertuju pada salah satu desa yang berada di Kecamatan

Bulakamba, yakni Desa Grinting. Stigma tersebut sudah dikenal dalam skala nasional. Informasi tersebut banyak ditemukan dalam pemberitaan media masa elektronik maupun media *online*.

Awal mula Desa Grinting mendapat julukan atau stigma sebagai "*kampung pengemis*" yang sekaligus menggelandang di Kota Jakarta adalah sebagian penduduk Desa Grinting pada waktu itu merantau ke Jakarta dengan berbagai macam profesi. Namun Kepala Desa Grinting yakni Bapak Suhartono tidak menyangkal bahwasanya ada sebagian penduduk yang berprofesi sebagai pengemis di Kota Jakarta. Stigma tersebut semakin menguat karena adanya pemberitaan media masa baik elektronik maupun online.

Disamping itu yang melatarbelakangi sebagian warga Desa Grinting menggelandang dan mengemis adalah dikarenakan faktor ekonomi yang rendah

Upaya Pemerintah Kabupaten Brebes terhadap Stigma Desa Grinting Sebagai "Kampung Pengemis"

Selanjutnya untuk permasalahan Desa Grinting mengenai stigma "*kampung pengemis*" yang menggelandang di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung. Pihak pemerintah setempat, dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Brebes dan Pemerintah Desa Grinting yang

bertanggungjawab dalam permasalahan ini. Karena sebagian penduduk warga Desa Grinting yang merantau sebagian besar ke Jakarta lalu sebagian bekerja sebagai pengemis

Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas Sosial aktif *turun tangan* dalam menyelesaikan masalah kemiskinan yang menjadi penyebab warga menggelandang dan mengemis di kota-kota besar. Namun sifat dari bantuan tersebut termasuk dalam bantuan dangkal yang sifatnya hanya stimulan.

Upaya Pemerintah Desa Grinting terhadap Stigma Desa Grinting Sebagai "Kampung Pengemis"

Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes sangat terkenal di media masa elektronik, cetak, maupun online. Desa tersebut terkenal bukan karena potensinya namun terkenal sebagai *Desa Penghasil Pengemis* atau *Kampung Pengemis*. Sesuai dengan pemberitaan *online* bahwasanya dikarenakan sebagian besar warganya banyak melakukan urbanisasi demi merubah nasib kehidupan di kampung, namun dengan bekerja menggelandang dan mengemis.

Upaya Pemerintah Desa Grinting dalam mensosialisasikan warganya bahwa potensi desa dapat dijadikan nilai ekonomi. Dengan adanya slogan Bagaimana Pengemis

menjadi Pengemas. Melalui pemanfaatan hasil dari tambak ikan bandeng yang dapat diolah dalam bentuk lain. Seperti ikan bandeng yang diolah menjadi abon, pemanfaatan daun kelor sebagai teh dan keripik yang kaya akan gizi dan bernilai ekonomi tinggi.

Dari sisi inovasi dan kreasi warga Desa Grinting memanfaatkan plastik bekas menjadi tas dan ukiran patung pada asbak yang bernilai seni tinggi.

Lalu adanya kesepakatan antar Pemerintah Desa dengan pabrik rokok yang berdiri di wilayah Desa Grinting. Kesepakatan tersebut berupa serapan tenaga kerja dari

Grinting untuk pabrik rokok mencapai 60%

Faktor Pendukung dan Penghambat

Maasyarakat Desa Grinting sangat mendukung bantuan dan program dari pemerintah kaitannya penanggulangan gelandangan dan pengemis agar kembali hidup normal seperti warga yang lainnya.

Sehingga memudahkan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Namun ada hal yang masih menjadi kekurangan mengenai tindak lanjut perihal bantuan yang diberikan kepada masyarakat Desa Grinting yang menerima bantuan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai Peran Pemerintah Kabupaten Brebes dalam Menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada Gelandangan dan Pengemis Studi Kasus Desa Grinting diatas maka dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Kabupaten Brebes bereaksi cepat ketika Desa Grinting diberitakan sebagai Kampung Pengemis yang mengelandang di kota-kota besar, seperti Jakarta.

Kemudian dari segi sumberdaya semua aktor yang terlibat juga sudah baik. Namun ada beberapa kekurangan mengenai monitoring dan evaluasi mengenai

bantuan dan program yang diberikan kepada Desa Grinting oleh Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas Sosial Kabupaten Brebes.

Dari segi dukungan finansial yang ada untuk program dan bantuan ini sudah cukup baik, namun ada kekurangan, dimana ada sebagian bantuan yang diberikan bersifat stimulan sementara. Justru hal semacam ini melmahkan warga agar hidup mandiri.

Namun disisi lain, dari Pemerintah Desa Grinting cukup aktif dalam mengelola potensi desa yang guna memperbaiki

kesejahteraan warga Grinting. Melalui kegiatan yang bersifat ekonomi kreatif, harapan dari Pemerintah Desa Grinting supaya warga yang merantau lalu bekerja serabutan di kota-kota besar agar dapat kembali dan meningkatkan ekonomi keluarga melalui potensi desa yang ada.

Selain nilai ekonomi, muncul nilai moral pada warga Desa Grinting khususnya generasi muda yang orang tuanya bekerja mengemis dan mengelandang di kota-kota besar mulai muncul perasaan malu, bhawa pekerjaan tersebut jauh dari keteraturan sosial.

SARAN

1. Dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis, Pemerintah Kabupaten Brebes dapat mengalokasikan dana APBD secara khusus terhadap penanganan yang dalam satu kesatuan.
2. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, Dinas Sosial merupakan terdorong baru, karena merupakan pecahan dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
3. Pembuatan kebijakan yang lebih terkhusus mengenai penanganan gelandangan dan pengemis.
4. Meningkatkan sinergi antara Dinas Sosial dengan Lembaga Sosial.
5. Permasalahan gelandangan dan pengemis merupakan sebuah

permasalahan yang kompleks dan membutuhkan koordinasi dan kerjasama yang baik antar *stakeholders*.

6. Bagi Pemerintah Desa Grinting mempublikasikan lagi mengenai potensi desa, sehingga stigma kampung pengemis dapat dihilangkan.
7. Bagi Pemerintah Desa Grinting agar dapat memperluas kerjasama dengan pihak luar guna meningkatkan kesejahteraan sosial bagi warga Desa Grinting dengan potensi desa yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bogdan, Taylor, dan Lexy J. Moleong. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Ndraha, Taliziduhu. 1989. "*Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*", Jakarta: Bina Aksara.
- Neuman, W. Lawrence. 2000. *Social Research Methods (Qualitative and Quantitative Approaches)*. Toronto: Allyn and Bacon.

- R. Soetrisno. 2001. *Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Pembebasan Kemiskinan*. Yogyakarta: Filosofi Press.
- Rasyid, M. Ryaas. 1996. "Makna Pemerintahan, Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan". Jakarta: PT. Yarsif Watampone.
- Setiyono, Budi. 2005. *Birokrasi Dalam Perspektif Politik dan Administrasi*. Bandung : Nuansa.
- Suharto, Edi. 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Refika Adistama, Bandung
- Usman, Sunyoto (2004), *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wangsa, Mara Satria (2007), *Membangun Manusia Indonesia*, Jakarta: Intisari Mediatama.
- Y. Argo Twikromo, 1999, *Gelandangan Yogyakarta: Suatu Kehidupan dalam Bingkai Tatanan Sosial-Budaya "Resmi"*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Jurnal:**
- Wisnu Andrianto dkk, "Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial" *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 2. No. 2. Hal. 202-209.
- Florentinus Christian Imanuel. 2015. "Peran Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Budaya Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara". *e-Journal Ilmu Pemerintahan*. Vol.3, No. 2.
- J. Arifin. 2016. *Analisis Kinerja Dinsosnakertrans Ponorogo dalam Penanggulangan PMKS (Penutupan dan Pembongkaran Bangunan Lokalisasi di Desa Kedung Banteng, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo)*.
- Gusti Indah Pratiwi. Februari 2016. "Peran Pemerintah dalam Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas di

Pekanbaru” Jom FISIP. Vol. 3 No.1.

Harniati dalam Vandy Wijanarko, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kecamatan Jembluk Kabupaten Jember* [Skripsi], Universitas Jember, Jember.

Angger Angelino Montolalu, “*Peranan Pemerintah dalam Mewujudkan Pendidikan Wajib Belajar di Kecamatan Matuari Kota Bitung*”.

Dokumen:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, “Brebes Dalam Angka 2018”

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2017.

RPJMD Kabupaten Brebes 2017-2022.

Kementerian Sosial RI, 2013, *Buku Panduan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial*.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Bab 1 Pasal 1

Lain-lain:

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/23/kabupaten-kota-di-jawa-tengah-dengan-kemiskinan-tertinggi>, diakses pada tanggal 04 April 2019

Republika.co.id, *Ini Dia Kampung Penghasil Pengemis, Dimanakah?*, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/08/11/m8ka10-ini-dia-kampung-penghasil-pengemis-dimanakah-1>, diakses pada tanggal 29 Mei 2019, Pukul 19.29 WIB.

Liputan6.com, *Warga Desa Grinting Brebes Melawan Stigma Kampung Pengemis*, <https://www.liputan6.com/regional/read/2988621/warga-desa-grinting-brebes-melawan-stigma-kampung-pengemis>, diakses pada tanggal 29 Mei 2019, Pukul 20.54 WIB.